



**PENGARUH PENGANGGURAN, PMA DAN PMDN  
TERHADAP PDRB DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh  
**LUCYANA AGUSTIN**  
**110810101086**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**



**PENGARUH PENGANGGURAN, PMA DAN PMDN  
TERHADAP PDRB DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh  
**LUCYANA AGUSTIN**  
**110810101086**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Endang dan Ayahanda Sudirman serta Suami M. Alhuri tercinta yang senantiasa telah memberikan iringan doa disetiap perjalanan hidup penulis, memberikan kasih sayang, semangat, pengorbanan yang tak terhingga kepada penulis;
2. Guru-guru sekolahku dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, serta guru-guru tercintaku yang selalu memberikan sumbangsih ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**MOTTO**

“Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya”  
(Cherterfield)

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”  
(Lessing)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUCYANA AGUSTIN

NIM : 110810101086

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pengangguran, PMA dan PMDN Terhadap PDRB di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Juli 2018

Yang menyatakan,

Lucyana Agustin

NIM. 110810101086

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENGANGGURAN, PMA DAN PMDN TERHADAP PDRB  
DI INDONESIA**

Oleh

**Lucyana Agustin**

**NIM 110810101086**

**Pembimbing**

**Dosen Pembimbing Utama : Dr. Duwi Yunitasari, S.E.,M.E.**

**Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Regina Niken Wilantari, S.E.,M.Si.**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi :PENGARUH PENGANGGURAN, PMA DAN PMDN  
TERHADAP PDRB DI INDONESIA  
Nama Mahasiswa : LUCYANA AGUSTIN  
NIM : 110810101086  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Regional  
Tanggal Persetujuan : 19 Juli 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Duwi Yunitasari, S.E., M.E.  
NIP.197806162003122001

Dr. Regina Niken Wilantari, S.E., M.Si.  
NIP.197409132001122001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes  
NIP. 196411081989022001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**  
**Pengaruh Pengangguran, PMA dan PMDN terhadap PDRB di Indonesia**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Lucyana Agustin

NIM : 110810101086

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal :

20 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Lilis Yuliati, S.E., M.Si. (.....)  
NIP. 196907181995122001
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes. (.....)  
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Fajar Wahyu Prianto, S.E, M.E. (.....)  
NIP. 198103302005011003

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Foto 4 x 6

warna

Dr. Muhammad Miqdad. S.E, M.M, Ak. CA  
NIP. 197107271995121001



*Pengaruh Pengangguran, PMA dan PMDN terhadap PDRB di Indonesia*

**LUCYANA AGUSTIN**

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara (M. Raharjo, 2011). Mengatasi permasalahan PDRB tidak dapat dilakukakan terpisah dari faktor yang mempengaruhi seperti : pengangguran, PMA dan PMDN serta faktor lainnya. Presentase PDRB di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016. Sedangkan persentase PDRB untuk 33 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan. Studi ini meneliti tentang pengaruh pengangguran, PMA dan PMDN terhadap PDRB di 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2016. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menganalisa seberapa besar dan bagaimana pengaruh variabel pengangguran, PMA dan PMDN terhadap PDRB di 33 provinsi di Indonesia sehingga nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan PDRB di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS serta *browsing website internet* sebagai pendukung. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan metode *FEM* dengan bantuan *software Eviews9*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, variabel PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

*Kata kunci : Pengangguran, PMA, PMDN, PDRB*

*The effect of unemployment, PMA and PMDN on PDRB in Indonesia*

**LUCYANA AGUSTIN**

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Ekonomi and  
Business, University of Jember*

**ABSTRACT**

Gross Regional Domestic Product (GDP) is one of the important indicators to know the economic growth in a country (M. Raharjo, 2011). Overcoming the problem of GRDP can not be separated apart from influencing factors such as: unemployment, PMA and PMDN and other factors. Percentage of GRDP in Indonesia has increased from 2012-2016. While the percentage of GRDP for 33 provinces in Indonesia has increased. This study examines the effect of unemployment, PMA and PMDN on GRDP in 33 provinces in Indonesia 2012-2016. The purpose of this study is expected to analyze how big and how the influence of unemployment, PMA and PMDN to PDRB in 33 provinces in Indonesia so that later it is expected to be used as one of the base in determining policy in overcoming problems of PDRB in Indonesia. The data used in this research is secondary data obtained from BPS as well as browsing internet website as support. While the method used in this study is the method of panel data regression analysis with FEM method with the help of software Eviews 9. The results of this study showed that the unemployment variable has a negative effect and not significant to GDP, the PMA variable has a positive and significant effect to GDP and PMDN berpengaruh positive and significant to GRDP.

Keywords: Unemployment, PMA, PMDN, PDRB

## RINGKASAN

**Pengaruh Pengangguran, PMA dan PMDN Terhadap PDRB di Indonesia;**  
Lucyana Agustin; 110810101086: Halaman 76; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi  
Pembangunan; Fakultas Ekonomi dan Bisnis;  
Universitas Jember.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengangguran, PMA dan PMDN Terhadap PDRB di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap PDRB di Indonesia, untuk mengetahui pengaruh PMA terhadap PDRB di Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh PMDN terhadap PDRB di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder penggabungan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2012-2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 33 data provinsi di Indonesia yang menghasilkan 165 observasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengangguran, PMA dan PMDN berpengaruh terhadap PDRB di Indonesia.

Hasil dari analisis regresi data panel adalah Nilai konstanta PDRB sebesar 11,41526, nilai tersebut menunjukkan bahwa PDRB sebesar 11,41526 persen apabila variabel pengangguran, PMA dan PMDN konstan. Pengaruh tidak signifikan pengangguran terhadap PDRB dengan konstanta sebesar -0,049, yang artinya apabila terjadi kenaikan pengangguran sebesar satu persen maka akan menurunkan PDRB sebesar 0,049 miliar. Pengaruh signifikan PMA terhadap PDRB dengan konstanta sebesar 0,042 yang artinya apabila terjadi kenaikan PMA sebesar satu juta US\$ maka akan menaikkan sebesar 0,042 miliar. Pengaruh signifikan PMDN terhadap PDRB dengan konstanta sebesar 0,025 yang artinya apabila terjadi kenaikan PMDN sebesar satu juta US\$ maka akan menaikkan PDRB sebesar 0,025 miliar.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani serta petunjuk dan kekuatan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul Pengaruh Pengangguran, PMA dan PMDN Terhadap PDRB di Indonesia bisa diselesaikan. Shalawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun untuk skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini berguna bagi Pemerintah, serta dapat memberikan sumbangan bagi pembacanya.

DAFTAR ISI

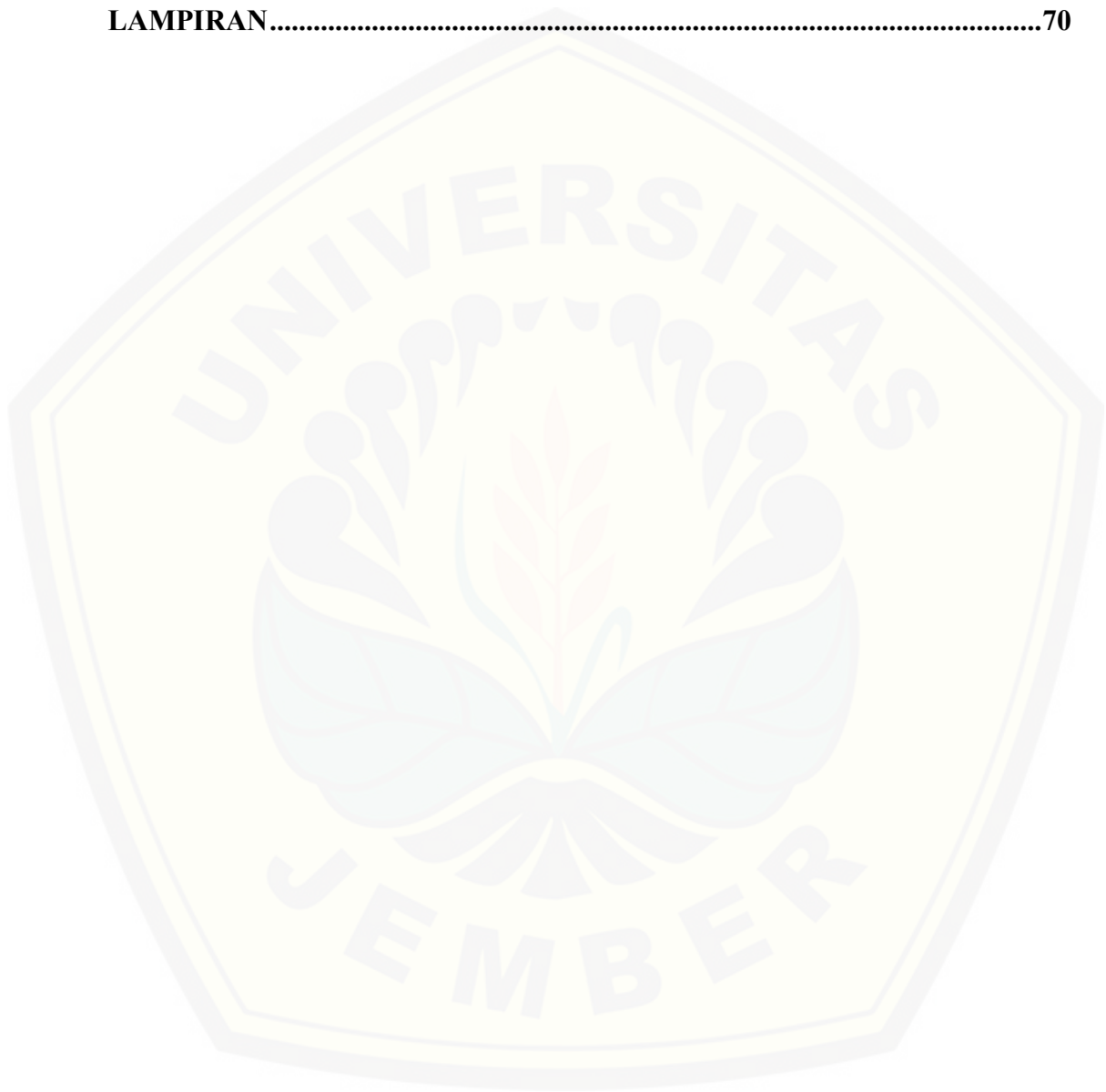
	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
<b>2.1 Pembangunan Ekonomi</b> .....	<b>8</b>
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith.....	<b>8</b>
2.1.2 Pengertian pembangunan Ekonomi .....	<b>9</b>
<b>2.2 Pertumbuhan Ekonomi</b> .....	<b>12</b>
2.2.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Regional	<b>13</b>
2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	<b>15</b>
<b>2.3 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB)</b> .....	<b>17</b>



2.3.1	Definisi PDRB .....	17
2.3.2	Perhitungan PDRB .....	17
2.3.3	Wilayah Domestik dan Regional .....	18
2.3.4	PDRB atas dasar harga .....	19
2.3.5	PDRN Atas Dasar Harga Pasar.....	19
2.3.6	PDRN Atas Dasar Biaya Faktor .....	20
<b>2.4</b>	<b>Pengangguran .....</b>	<b>21</b>
<b>2.5</b>	<b>Investasi.....</b>	<b>23</b>
2.5.1	Pengertian Investasi.....	23
2.5.2	Teori Investasi .....	24
2.5.3	Jenis Investasi.....	25
<b>2.6</b>	<b>Penanaman Modal Asing (PMA) .....</b>	<b>28</b>
<b>2.7</b>	<b>Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....</b>	<b>28</b>
<b>2.8</b>	<b>Hubungan Antar Variabel .....</b>	<b>30</b>
2.8.1	Hubungan Antara Pengangguran dan PDRB.....	30
2.8.2	Hubungan Antara PMA dan PDRB .....	31
2.8.3	Hubungan Antara PMDN dan PDRB .....	31
<b>2.9</b>	<b>Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>32</b>
<b>2.10</b>	<b>Kerangka Konseptual .....</b>	<b>33</b>
<b>2.11</b>	<b>Hipotesis .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 3</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1</b>	<b>Jenis Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2</b>	<b>Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.3</b>	<b>Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>37</b>
<b>3.4</b>	<b>Unit Analisis .....</b>	<b>38</b>
<b>3.5</b>	<b>Spesifikasi Model.....</b>	<b>38</b>
<b>3.6</b>	<b>Metode Penelitian .....</b>	<b>39</b>
3.6.1	Metode Panel Least Square (PLS).....	39
3.6.2	Permodelan Data Panel.....	40
3.6.3	Pemilihan Model Data Panel .....	42
<b>3.7</b>	<b>Uji Statistik.....</b>	<b>43</b>

3.7.1	Uji F (Uji Secara Simultan).....	43
3.7.2	Uji t (Uji Parsial) .....	44
<b>3.8</b>	<b>Koefisien Determinasi .....</b>	<b>45</b>
<b>3.9</b>	<b>Uji Asumsi Klasik.....</b>	<b>45</b>
3.9.1	Uji Multikolinieritas .....	46
3.9.2	Uji Heterokedastisitas .....	46
3.9.3	Uji Normalitas .....	47
<b>3.10</b>	<b>Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran.....</b>	<b>48</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
<b>4.1</b>	<b>Gambaran Umum.....</b>	<b>50</b>
4.1.1	Keadaan Geografis Wilayah Indonesia .....	50
4.1.2	Deskripsi Pengangguran di Indonesia .....	51
4.1.3	Deskripsi PDRB di Indonesia .....	52
4.1.4	Deskripsi Penanaman Modal Asing Di Indonesia.....	55
<b>4.2</b>	<b>Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel .....</b>	<b>55</b>
4.2.1	Uji Chow .....	55
4.2.2	Uji Hausman.....	56
<b>4.3</b>	<b>Analisis Data Panel .....</b>	<b>56</b>
<b>4.4</b>	<b>Uji Statistik.....</b>	<b>57</b>
4.4.1	Uji Secara Simultan (Uji F).....	57
4.4.2	Uji Parsial (Uji t) .....	58
<b>4.5</b>	<b>Uji Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>).....</b>	<b>58</b>
<b>4.6</b>	<b>Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>59</b>
4.6.1	Uji Normalitas .....	59
4.6.2	Uji Multikolinearitas .....	59
4.6.3	Uji Heterokedastisitas .....	60
<b>4.7</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>60</b>
4.7.1	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap PDRB di Indonesia .....	61
4.7.2	Pengaruh PMA Terhadap PDRB di Indonesia .....	62
4.7.3	Pengaruh PMDN Terhadap PDRB di Indonesia .....	63

<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>64</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>70</b>



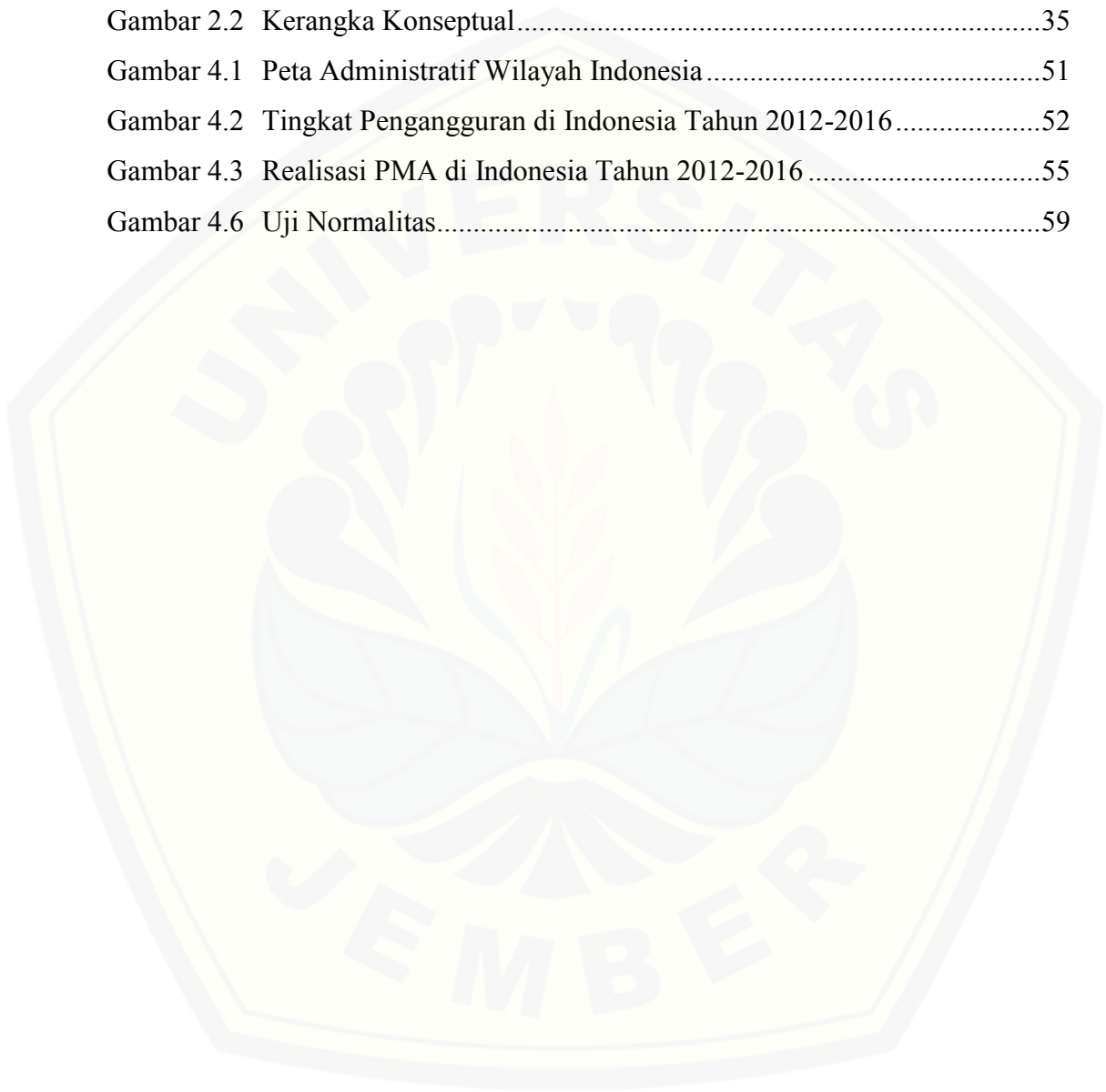


**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Produk Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2012-2016 .....1
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB di Indonesia tahun 2012-2016.....3
Tabel 1.3	Realisasi PMA dan PMDN di Indonesia tahun 2012-2016.....5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....26
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2012-2016 .....54
Tabel 4.2	Uji Chow .....56
Tabel 4.3	Uji Hausman .....56
Tabel 4.4	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....57
Tabel 4.5	Uji F.....57
Tabel 4.6	Uji t .....58
Tabel 4.7	Uji Determinan( $R^2$ ) .....58
Tabel 4.8	Uji Multikolinearitas .....60
Tabel 4.9	Uji Heterokedastisitas .....60

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Pengangguran di Indonesia Tahun 2012-2016.....	4
Gambar 2.1 Kurva Hukum Okun.....	30
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4.1 Peta Administratif Wilayah Indonesia.....	51
Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 2012-2016.....	52
Gambar 4.3 Realisasi PMA di Indonesia Tahun 2012-2016.....	55
Gambar 4.6 Uji Normalitas.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran A	Data PDRB di Indonesia Tahun 2012-2016 .....70
Lampiran B	Data Realisasi PMA di Indonesia Tahun 2012-2016.....71
Lampiran C	Data PMDN di Indonesia Tahun 2012-2016 .....72
Lampiran D	Data Pengangguran di Indonesia Tahun 2012-2016 .....73
Lampiran E	Uji Chow .....74
Lampiran F	Uji Hausman .....75
Lampiran G	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i> .....76
Lampiran H	Uji Normalitas .....77
Lampiran I	Uji Multikolinearitas .....78
Lampiran J	Uji Heterokedastisitas .....79

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang baik dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar (Todaro, 2006: 45). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional terhadap perubahan yaitu perubahan struktur ekonomi nasional dan perubahan struktur ekonomi daerah. Arah dan kebijaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2012 - 2016

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2012	6,19
2013	5,56
2014	5,02
2015	4,79
2016	5,02

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2012–2016 bahwa selama lima tahun pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012-2015 pertumbuhan ekonomi cenderung turun terus-menerus dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi baru mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan menandakan kinerja perekonomian masih kurang maksimal.

Widodo (2006), menyatakan bahwa indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang

berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagian jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun yang bersangkutan sehingga nilai agregatnya masih mengandung pengaruh perubahan harga. Sementara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada kenyataan PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB suatu wilayah meningkat, maka jumlah output dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB di 33 Provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, dimana PDRB terendah diduduki Provinsi Maluku Utara sedangkan PDRB tertinggi diduduki Provinsi DKI Jakarta. PDRB di Indonesia tahun 2012-2016 cenderung meningkat. Tahun 2012 PDRB di Indonesia mencapai Rp7.727.083,4 miliar. Tahun 2013 PDRB mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar Rp8.156.497,8 miliar. Tahun 2014 PDB mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp8.564.866,6 miliar. Pada tahun 2015 dan 2016 PDRB terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp8.982.511,3 miliar dan tahun 2016 PDRB sebesar Rp9.433.034,4 miliar.

Data PDRB di Indonesia tahun 2012-2016 dapat dilihat dari Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah)

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	108914,9	1117551,83	113490,36	112661,04	116386,73
2	Sumatera Utara	375924,14	398727,14	419573,31	440955,85	463775,46
3	Sumatera Barat	118724,42	125940,63	133340,84	140704,88	148110,75
4	Riau	425626	436187,51	447986,78	448991,96	458998,09
5	Jambi	104615,08	111766,13	119991,44	125036,4	130499,63
6	Sumatera Selatan	220459,2	232175,05	243297,77	254044,88	266815,41
7	Bengkulu	32363,04	34326,37	36207,15	38066,01	40082,87
8	Lampung	170769,21	180620,01	189797,49	199536,1	209807,19
9	Kep. Bangka Belitung	40104,91	42190,86	44159,44	45961,46	47852,69
10	Kep. Riau	128034,97	137263,85	146325,23	155112,88	162922,5
11	Dki Jakarta	1222527,92	1296694,57	1373389,13	1454345,82	1539376,65
12	Jawa Barat	1028409,74	1093543,55	1149216,06	1207083,41	1275546,48
13	Jawa Tengah	691343,12	726655,12	764959,15	806775,36	849383,56
14	DI Yogyakarta	71702,45	75627,45	79536,08	83474,44	87687,93
15	Jawa Timur	1124464,64	1192789,8	1262684,5	1331394,99	1405236,11
16	Banten	310385,59	331099,11	349351,23	368216,55	387595,37
17	Bali	106951,46	114103,58	121787,57	129130,59	137192,52
18	Nusa Tenggara Barat	66340,81	69766,71	73372,96	89344,58	94548,21
19	Nusa Tenggara Timur	48863,19	51505,19	54107,97	56831,92	59775,7
20	Kalimantan Barat	96161,93	101980,34	107114,96	112324,86	118184,63
21	Kalimantan Tengah	64649,17	6941,99	73724,52	78890,97	83909,49
22	Kalimantan Selatan	96697,84	101850,54	106779,4	110867,88	115727,55
23	Kalimantan Timur	469646,25	438532,91	446029,05	440647,7	438977,04
24	Sulawesi Utara	58677,59	62422,5	66360,76	70425,14	74771,07
25	Sulawesi Tengah	62249,53	68219,32	71677,53	82803,2	91070,55
26	Sulawesi Selatan	202184,59	217589,13	233988,05	250758,28	269338,55
27	Sulawesi Tenggara	59785,4	64268,71	68291,78	72991,33	77739,55
28	Gorontalo	17987,07	19367,57	20775,8	22068,59	23507,15
29	Sulawesi Barat	20786,89	22227,39	24195,65	25983,65	27550,26
30	Maluku	21000,08	22100,94	23567,73	24859,06	26291,19
31	Maluku Utara	17120,07	18208,74	19208,76	20381,03	21556,32
32	Papua Barat	44423,34	47694,23	50259,91	52346,49	54711,28
33	Papua	107890,94	117118,82	121391,23	130459,91	142476,35
	Indonesia	7727083,4	8156497,8	8564866,6	8982511,3	9433034,4

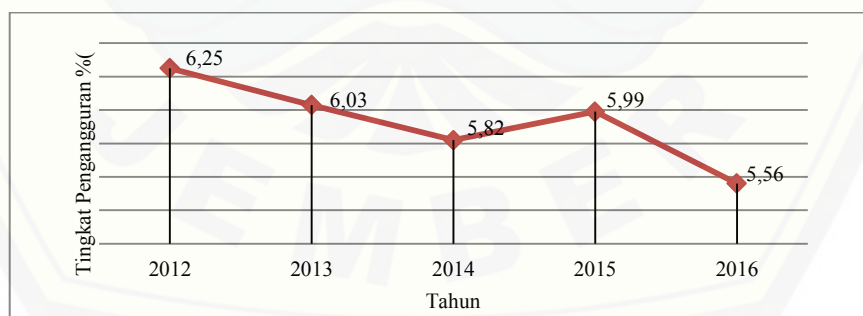
Sumber: BPS Indonesia, 2017



Pengangguran adalah suatu masalah yang dihadapi semua negara di dunia sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja termasuk dalam angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja (Astuti, 2014: 10). Pengangguran selalu menjadi salah satu dari prioritas masalah yang harus dihadapi dalam setiap perencanaan pembangunan. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka akan menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (BPS, 2007).

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu Negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk masyarakat yang menganggur yang berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuelsen, 2008: 363-364).

Selain itu masalah lain yang timbul adalah ketidakstabilan politik, angka kriminalitas yang akan terus bertambah, dimana hal ini dapat mengganggu tingkat keamanan nasional yang mengakibatkan investor enggan untuk melakukan investasi. Data pengangguran dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.1: Pengangguran di Indonesia Tahun 2012-2016

Sumber: BPS Indonesia, 2017

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk dapat mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan jalan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi juga memerlukan modal yang relatif besar yang akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur, baik fisik maupun sosial. Dana yang dibutuhkan untuk menambah modal disebut investasi.

Investasi terdiri dari investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan investasi asing atau penanaman modal asing (PMA).

Tabel 1.3 Realisasi PMA dan PMDN di Indonesia Tahun 2012–2016 (JutaUS\$)

Tahun	PMA	PMDN
2012	\$24564,7	\$92182,0
2013	\$28617,5	\$128150,6
2014	\$28529,7	\$156126,3
2015	\$29275,9	\$179465,9
2016	\$28964,1	\$216230,8

Sumber: BPS Indonesia

Dilihat dari Tabel 1.3 Realisasi PMA dan PMDN di Indonesia Tahun 2012-2016 semakin meningkat. Tahun 2012-2015 PMA di Indonesia terus mengalami peningkatan, tapi di tahun 2016 PMA mengalami penurunan menjadi \$28.964,1 juta. Sedangkan PMDN tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan, tahun 2012 PMDN di Indonesia mencapai \$92.182 juta dan terus meningkat sampai tahun 2016 mencapai \$216.230,8 juta.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri yang ada dalam daerahnya. Dengan begitu daerahnya bisa membiayai kebutuhan daerahnya sendiri baik dalam pembiayaan roda pemerintahan maupun pembiayaan pembangunan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dijabarkan dalam variabel-variabel ekonomi yang meliputi penciptaan kesempatan kerja, pertumbuhan PDB dan menekankan laju inflasi. Tujuan ekonomi tersebut merupakan sarana ekonomi dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

Kebijakan ekonomi tersebut kadang saling bertentangan (*trade-off*) satu dengan yang lainnya, dalam arti jika diterapkan suatu kebijakan ekonomi untuk mencapai salah satu sasaran, maka akibat kebijaksanaan tersebut justru menjauhkan dari sasaran yang lain. Sebagai contoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada harga umum atau menyebabkan terjadinya inflasi. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misal adanya pengangguran yang cukup tinggi, inflasi atau defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan dan mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit neraca pembayaran.



## 1.2 Rumusan Masalah

PDRB merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah. PDRB di Indonesia masalah yang sangat sulit dipecahkan, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap PDRB di 33 provinsi di Indonesia agar diketahui faktor-faktor apa saja yang perlu didukung dan ditingkatkan guna mengurangi pengangguran. Besarnya PDRB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pengangguran, PMA dan PMDN, oleh karena itu dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap PDRB di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh PMA terhadap PDRB di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh PMDN terhadap PDRB di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui pengaruh pengangguran terhadap PDRB di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh PMA terhadap PDRB di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh PMDN terhadap PDRB di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan suatu gambaran mengenai hasil dari pembangunan regional sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi para pelaku ekonomi pada umumnya dan pemerintah Indonesia pada khususnya.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama yang mempunyai obyek penelitian yang sama

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pembangunan Ekonomi

#### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Adam Smith

Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Adam Smith menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith:

#### 1. Pembagian Kerja

Pembagian adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja, penghematan waktu dalam memproduksi barang, penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

#### 2. Penumpukan Modal

Adam Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap penumpukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

#### 3. Agen Pertumbuhan

Menurut Adam Smith menurutnya para petani, produsen dan pengusaha merupakan agen kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong

peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Dilain pihak naiknya produktifitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

#### 2.1.2 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital.

Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya

keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

Pembangunan ekonomi dapat dirumuskan sebagai suatu usaha untuk megurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks luas pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (Todaro, 1993: 352). Pembangunan ekonomi juga berkaitan erat dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional (Scumpeter, 2000:5). Pembangunan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menjadikan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam waktu jangka panjang (Sukirno, 2000: 87). Dari definisi tersebut maka pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, yaitu pembangunan ekonomi merupakan:

1. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus.
2. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan tingkat pendapatan perkapita.
3. Pembangunan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Definisi pembangunan ekonomi yang paling banyak disebut berasal dari Prof. Meier (Adisasmita, 2005: 189), yaitu sebagai suatu proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam jangka waktu yang panjang, dengan syarat bahwa sejumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan mutlak tidak naik, dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Adisasmita, 2005: 205).

Pembangunan ekonomi pada dasarnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985:13). Dari definisi tersebut bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian:

1. Suatu proses yang terjadi secara terus menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang.
4. Kenaikan pendapatan per kapita diikuti dengan terjadinya perubahan teknologi atau lembaga misalnya di sektor pertanian, yang dulunya

pengolahan lahan dengan menggunakan tenaga hewan, sekarang berganti menggunakan traktor.

Dudley Seers (Sanusi, 2004: 28), menyatakan bahwa, pernyataan-pernyataan yang harus dipermasalahkan dalam suatu pembangunan didalam suatu Negara adalah mencakup pertanyaan apa yang terjadi dengan pengangguran, dengan kemiskinan, dan dengan ketidakmerataan atau ketimpangan. Apabila tiga pernyataan tersebut menurun maka pembangunan sedang terjadi di negara itu. Jika salah satu atau dua dari tiga pernyataan tersebut semakin memburuk maka akan aneh bila disebut sebagai hasil dari suatu pembangunan, walaupun pendapatan perkapitanya meningkat (Sanusi, 2004: 52).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dan wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999).

## 2.2 Pertumbuhan Ekonomi

*Pertumbuhan Ekonomi menurut Adam Smith* adalah tokoh klasik yang banyak membahas mengenai teori-teori ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes Wealrth of Nation* (1776), Adam Smith menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk.

Perhitungan output total dilakukan dengan tiga variabel, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital atau modal. Sedangkan untuk faktor kedua, yakni pertumbuhan penduduk, digunakan untuk menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut para ahli, yaitu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad 2000).



Sektor-sektor yang memberikan peran utama bagi perkembangan perekonomian daerah, menurut Richardson (2001) dan Glasson (2000), salah satu pendekatan model ekonomi regional adalah analisis basis ekonomi (*economic base*), model ini dapat menjelaskan struktur ekonomi daerah atas dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Model *economic base* menekankan pada ekspansi ekspor sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 2000: 45).

#### 2.2.1 Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian terpenting dalam analisis ekonomi regional. Hal ini dikarenakan pertumbuhan merupakan salah satu indikator utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah dan mempunyai implikasi dalam berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Sasaran utama dalam teori pertumbuhan regional adalah untuk menjelaskan mengapa suatu wilayah atau daerah adalah pertumbuhannya yang cepat dan ada yang lambat. Di samping itu analisis pertumbuhan ekonomi regional ini juga dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan dan ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan antar wilayah atau kawasan lainnya (Sjafrizal, 2008:85)

Menurut Malthus (Jhingan, 2002: 100), proses pembangunan ekonomi tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi suatu proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dipihak masyarakat. Dalam bukuyang berjudul *fassy af population*, Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tidak cukup dalam berlangsungnya pembangunan ekonomi, tetapi pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan (Jhingan, 2002:97).

Teori pertumbuhan Neo Klasik berkembang sejak tahun 1950. Teori ini dikembangkan oleh Robert Solow (1970) dan Trevor Swan (1950). Model *Solow* dan *Swan* menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi serta perkembangan output yang saling berinteraksi. Dengan kata lain suatu perekonomian akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi capital, dan kemajuan teknologi (Arsyad, 1999: 145).

Tybolt (Richardian, 1978, 46), telah memperkenalkan Teori basis (*Export Base Theory*) dan yang telah mengklarifikasikan sektor-sektor ekonomi atau pekerjaan menurut dasar-dasar dan bukan pasar (*basic dan non basic*) kegiatan basis merupakan suatu kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terkait pada kondisi internal perekonomian daerah dan sekaligus berfungsi untuk mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pekerjaan non basis merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung dari kondisi umum perekonomian daerah tersebut (*endogenous*). Sektor di wilayah itu ditentukan oleh sektor yang paling dominan dan tergantung kepada alam atau tempat.

Teori basis ekonomi, menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad, 1999:116). Bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*) sehingga akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. Teori lokasi juga sering digunakan untuk menentukan pemilihan lokasi kegiatan ekonomi, pertanian, industri dan jasa pada suatu daerah. Inti dari pemikiran teori lokasi ini berdasarkan pada sifat rasional dari seorang pengusaha atau perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Oleh karena itu pengusaha akan memilih lokasi usaha yang memaksimumkan keuntungannya dan meminimalisasikan biaya usaha/ produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat bahan baku dan pasar (Tambunan, 2001:288).

Teori kutub pertumbuhan yang dikembangkan oleh ahli ekonomi Perancis Francois Perroux pada tahun 1995 menjadi dasar strategi kebijakan industri daerah. Perroux berpendapat bahwa suatu pertumbuhan tidak mungkin akan muncul diberbagai daerah pada waktu bersamaan. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat melainkan di lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan, dengan intensitas yang berbeda, inti teori Perroux adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah keterkaitan antar industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.

2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan pada daerah-daerah lain.
3. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (unggulan) dengan industri yang relatif pasif atau industri yang tergantung dengan industri unggulan/ pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju/aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1999:147).

#### 2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Teori pertumbuhan wilayah mengadopsi teori pertumbuhan ekonomi makro kedalam suatu wilayah tersebut. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses yang berlangsung dalam rangka meningkatkan produksi barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang artinya timbul dan bertambah besar. Pengertian pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Menekankan dalam tiga aspek, yaitu proses, output perkapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi ada apabila tidak hanya terdapat kenaikan output persatuan input tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan perubahan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak (Irawan dan Suparmoko, 2002:6).

Kuznet (dalam Jhingan, 2002:5) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Adapun mengenai corak pertumbuhan ekonomi, Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah terjadi maka proses tersebut akan berlangsung secara kumulatif. Bila pasar berkembang, pembagian kerja dan spesialisasi akan terjadi dan akhirnya akan meningkatkan produktifitas.

Cepat lambatnya proses pertumbuhan itu intensitasnya sangat tergantung pada kemampuan yang dapat dibina dan dikerahkan secara efisien. Masalah kata pertumbuhan pembangunan tersebut tidak dapat terlepas dari tingkat produk yang diberikan oleh suatu masyarakat. Menurut Smith (dalam Jhingan, 2002:83) para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas dan persaingan yang mendorong mereka untuk memperluas pasar, yang pada gilirannya



memungkinkan pembangunan ekonomi. Menurut Hadjisarosa (1997: 5), pelaksanaan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, tercermin kepada skala pertimbangan skala ekonomis dan pemilihan lokasi yang dinilai paling menguntungkan dalam pemberian pelayanan. Selain itu tercermin pula pada pertimbangan untuk kelompoknya berbagai kegiatan usaha sebagai suatu jalan yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan bersama.

Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara, sedangkan daerah adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan pemerintah daerah. Wilayah nasional dan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hasil tinjauan obyek kaitannya dalam proses pengaturan pada umumnya. Adapun menurut Hadjisarosa (1997:9) proses berkembangnya wilayah berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu, yang disebut dengan mekanisme pembangunan. Pada mekanisme pembangunan dijumpai pula adanya stuan-satuan disebut dengan SWP (satuan wilayah pembangunan) adalah tinjauan objek seperti apa adanya dari proses perkembangan wilayah dan berlaku untuk satu satuan mekanisme pengembangan pembangunan berkisar pada kegiatan dan hasil-hasilnya. Yang dimaksud kegiatan tersebut tidak lain adalah berbagai jenis kegiatan yang tercakup dalam sektor pemerintah maupun masyarakat yang dilaksanakan dan diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya.

## **2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

### **2.3.1 Definisi PDRB**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara (M. Raharjo, 2011: 68). Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu regional atau provinsi di suatu negara. PDRB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga yang berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan PDRB yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung memakai harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar (Statistik Indonesia, 2013). Perhitungan

Produk Domestik Regional Bruto mempunyai manfaat berbagai pihak, yang dapat dikelompokkan menjadi empat, antara lain:

### 2.3.2 Manfaat Menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Manfaat penghitungan Produk Domestik Regional Bruto bagi suatu daerah, antara lain:

1. Untuk bahan evaluasi pembangunan di masa lalu, baik pembangunan sektoral maupun pembangunan regional secara keseluruhan.
2. Untuk bahan umpan balik terhadap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Sebagai dasar pembuatan proyeksi perkembangan perekonomian di masa yang akan datang.
4. Untuk membandingkan peranan masing-masing sektor perekonomian di suatu wilayah.
5. Jika perhitungan PDRB dihubungkan dengan banyaknya tenaga kerja, maka dapat mencerminkan produktivitas tenaga kerja masing-masing sektor.

### 2.3.3 Wilayah Domestik dan Regional

Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-residen).

#### 1. Produk Domestik

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan

nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional.

## 2. Produk Regional

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen.

## 3. Residen dan Non-Residen

Unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah lembaga non-profit, dikatakan sebagai residen bila mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah (Indonesia). Suatu rumah tangga, perusahaan, lembaga non profit tersebut mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah jika memiliki tanah/bangunan atau melakukan kegiatan produksi di wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (minimal satu tahun).

### 2.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan

nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

#### 2.3.5 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan antara konsep neto di sini dan konsep bruto di atas, ialah karena pada konsep bruto di atas; penyusutan masih termasuk di dalamnya, sedangkan pada konsep neto ini komponen penyusutan telah dikeluarkan. Jadi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan akan diperoleh Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar. Penyusutan yang dimaksud di sini ialah nilai susutnya barang-barang modal yang terjadi selama barang-barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai susutnya barang-barang modal dari seluruh sektor ekonomi dijumlahkan, maka hasilnya merupakan penyusutan yang dimaksud di atas.

#### 2.3.6 Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan antara konsep biaya faktor di sini dan konsep harga pasar di atas, ialah karena adanya pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada unit-unit produksi. Pajak tidak langsung ini meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseorangan. Pajak tidak langsung dari unit-unit produksi dibebankan pada biaya produksi atau pada pembeli hingga langsung berakibat menaikkan harga barang. Berlawanan dengan pajak tidak langsung yang berakibat menaikkan harga tadi, ialah subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi, yang bisa mengakibatkan penurunan harga.

Jadi pajak tidak langsung dan subsidi mempunyai pengaruh terhadap harga barang-barang, hanya yang satu berpengaruh menaikkan sedang yang lain menurunkan harga, hingga kalau pajak tidak langsung dikurangi subsidi akan diperoleh pajak tidak langsung neto. Kalau Produk Domestik Regional Netto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto, maka hasilnya adalah Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor.

### 1. Pendapatan Regional



Dari konsep-konsep yang diterangkan di atas dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor itu sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah. Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor, merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan yang timbul atau merupakan pendapatan yang berasal dari daerah tersebut. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tadi, tidak seluruhnya menjadi pendapatan penduduk daerah itu, sebab ada sebagian pendapatan yang diterima oleh penduduk daerah lain, misalnya suatu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh orang luar, tetapi perusahaan tadi beroperasi di daerah tersebut, maka dengan sendirinya keuntungan perusahaan itu sebagian akan menjadi milik orang luar yaitu milik orang yang mempunyai modal.

Kalau Produk Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir ke luar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan merupakan Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh yang tinggal di daerah yang dimaksud. Produk Regional Neto inilah yang merupakan Pendapatan Regional.

## 2. Pendapatan Regional Perkapita

Pendapatan perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk didaerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu Pendapatan Perkapita.

Akan tetapi, angka ini seringkali diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk. Angka pendapatan perkapita dapat dinyatakan dalam harga berlaku maupun dalam harga konstan tergantung pada kebutuhan.

## 2.4 Pengangguran

Menurut Sukirno (2000: 199), pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi masih belum mendapatkan pekerjaan. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Seperti yang ada dalam Teori Keynes menyatakan bahwa masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Terhambatnya pertumbuhan ini bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi disebabkan oleh rendahnya konsumsi pada masyarakat. Dalam standar pengertian yang telah ditentukan secara internasional, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Menurut Sukirno (2000: 201) pengangguran dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkan, yaitu:

1. Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih atau sesuai dengan keinginannya.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.
3. Pengangguran konjungtor, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Menurut Latumaerissa (2015: 134) definisi pengangguran mengalami penyesuaian atau perluasan seperti pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta dalam waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja.

Pengangguran dengan konsep atau definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka. Menurut Sakernas dalam Latumaerisa (2015: 21) pengangguran terbuka terdiri atas:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan pekerjaan.
3. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.



4. Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima kerja, tetapi belum mulai bekerja.

## 2.5 Investasi

### 2.5.1 Pengertian Investasi

Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran pemerintah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari  $PDB = C + I + G + (X-M)$ . Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masayang akan datang (Sunariyah, 2003:4)

Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital (Eni Setyowati dan Siti Fatimah N:2007).

### 2.5.2 Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok kapital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1. Teori Neo Klasik

Menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).

## 2. Teori Harrod-Domar.

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

### 2.5.3. Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul diakibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *induced investment*.

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (1997: 122) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

1. Investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang dinominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi yayasan pensiun, dan sebagainya.
2. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan di bidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam upaya untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan kegiatan promosi, baik melalui pengiriman utusan ke luar negeri maupun peningkatan kerjasama antara pihak swasta nasional dengan

swasta asing. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan perannya dalam menumbuhkan investasi.

Masuknya PMA di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan dilengkapi serta disempurnakan oleh UU No 11 Tahun 1970 juga tentang penanaman modal asing. Undang-undang itu didukung oleh berbagai kemudahan yang dilengkapi dengan berbagai kebijakan dalam paket-paket deregulasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menarik investasi didalam memenuhi kebutuhan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat baik itu dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Kebijakan tentang rencana PMDN ditetapkan oleh pemerintah melalui UU No 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya UU No. 12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari 2 jenis investasi yaitu: investasi bruto adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi. Investasi neto adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan). Investasi berdasarkan timbulnya: (1) investasi otonomi berarti pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional; (2) investasi terpengaruh (*induced investment*) investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

Menurut Sadono Sukirno (2003:5) investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi: (1) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri; (2) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan (3) pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.



## 2.6 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) dapat diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta di negara asal pemilik modal, atau penanaman modal suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah negara pemilik modal (Jhingga, 1994: 213). Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan (Dumairy, 1999: 23).

Demikian menurut Jhingga (1990: 156), negara berkembang tidak sanggup mengawali industri dasar dan industri kunci secara sendiri-sendiri. Sekali lagi melalui modal asinglah mereka dapat mendirikan pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronika berat dan kimia dan lain-lain. Lebih dari itu, penggunaan modal asing pada suatu industri akan dapat mendorong perusahaan setempat dengan mengurangi biaya pada industri-industri lain yang dapat mengarah pada perluasan mata rata industri terkait lainnya. Dalam hal ini modal asing akan membantu mengindustrialisasikan.

## 2.7 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai sumber domestik merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Disatu pihak, ia mencerminkan permintaan efektif, dilain pihak ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga meningkatkan tenaga kerja. Pembentukan atau penanaman modal ini akan membawa menuju kearah kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa kearah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas. Jadi, PMDN menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran. Serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri. Sumber yang dapat diarahkan untuk pembentukan modal ialah kenaikan pendapatan nasional, pengurangan konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas, meningkatkan keuntungan, langkah-langkah fiskal dan moneter dan sebagainya. Sumber domestik yang paling efektif yaitu tabungan. Tabungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan modal.



Pengertian PMDN yang terkandung dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

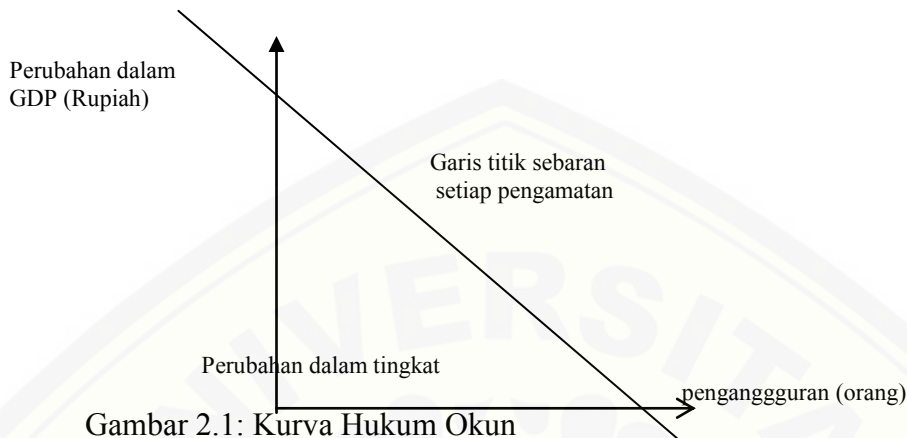
## **2.8 Hubungan Antar Variabel**

### **2.8.1 Hubungan antara pengangguran dan PDRB**

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan maupun penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena GDP merupakan indikator yang berhubungan dengan pengangguran. Secara teori setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Menurut Hukum Okun (*Okun's Law*) yang menguji hubungan antara tingkat pengangguran dengan besarnya GDP suatu Negara. Setiap penurunan 2 persen GDP, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menyediakan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, yang menggambarkan asosiasi antara pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka

pengangguran (Samueles and Nordhaus, 2004: 365-366). Kurva Hukum Okun dapat dilihat gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1: Kurva Hukum Okun

Sumber: Teori Makro Ekonomi (Mankiw 2000: 432)

### 2.8.2 Hubungan antara PMA dan PDRB

Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) menyatakan bahwa investasi disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama meningkat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh terutama sejak 1997.

Investasi baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan. Kesejahteraan dan membaiknya kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat tercapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

### 2.8.3 Hubungan antara PMDN dan PDRB

Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) menyatakan bahwa investasi disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama meningkat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh terutama sejak 1997.

Investasi baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA, tentunya diperlukan dalam mencapai suatu target pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi

merupakan unsur penting dalam sebuah proses pembangunan. Kesejahteraan dan membaiknya kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat tercapai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode analisis	Hasil Penelitian
1	Windi Wardani Sri Endang Kornita, SE, M.Si., Taryono, SE, M.Si	Analisis Pengaruh PMDN & PMA Terhadap PDRB di Kabupaten Siak	1. PDRB(Y) 2. PMDN (X1) 3. PMA (X2)	Regresi Linier Berganda (Time series)	PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Siak tahun 2003-2012.
2	Christiawan Eka Arianto, Sonny Sumarsono, M. Adenan	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember	1. Pertumbuhan Ekonomi (Y) 2. Jumlah Penduduk (X1) 3. Pengangguran (X2)	Regresi Linier Berganda (OLS)	Pengangguran berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Semakin naik pengangguran maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang terjadi, walaupun tidak signifikan pengangguran akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh modal ( <i>capital insentive</i> ).
3	Denty Octavianingrum,	Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah	1. Investasi (Y) 2. Tenaga Kerja (X1) 3. Tingkat Pendidikan (X2)		Jumlah investasi dilihat dari total jumlah investasi PMA Dan PMDN 5 Kabupaten / Kota di Provinsi DIY tahun 2007-2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY. Dengan meningkatnya jumlah investasi maka

		Iatimewa Yogyakarta: Studi 5 Kabupaten / Kota.			prtumbuhan ekonomi di Provinsi DIY akan meningkat.
--	--	--	--	--	--

### 2.10 Kerangka Konseptual

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor tersier ke sektor sekunder (PDRB, 2016: 3). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

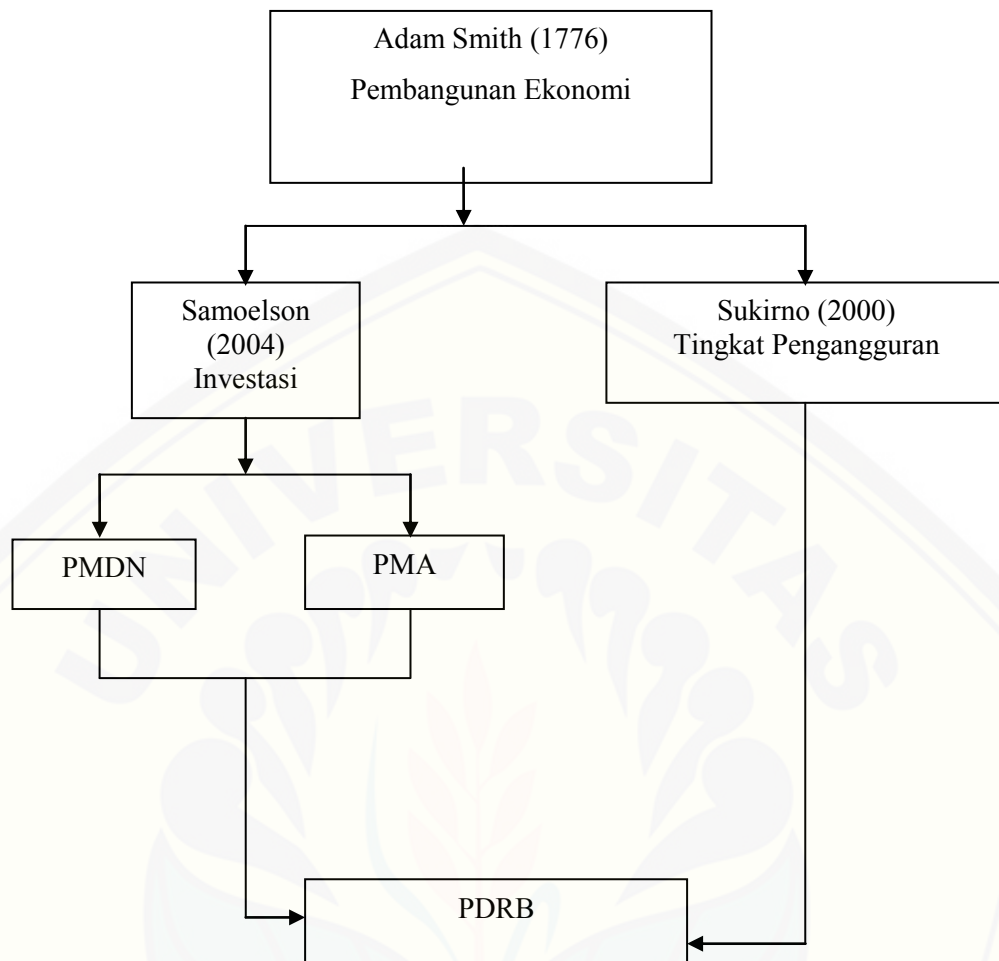
Investasi merupakan faktor ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi. Investasi di bagi menjadi dua yaitu investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) dan investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Menurut Widjaya (2000) Penanaman Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia dan alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara.

Hubungan antara investasidan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dalam teori ekonomi menurut Dornbusch dan Fischer (1997: 88) menyatakan bahwa investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang selajutnya berimplikasi terhadap kesempatan kerja disuatu wilayah. Investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN) akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sehingga proses produksi menjadi produktif. Adanya investasi asing akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan akan bertambah sehingga dalam jaringan yang luas akan menambah pendapatan nasional (Syah,2005).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dapat dilihat dalam Teori Hukum Okun (*Okun's Law*). Dalam Teori Hukum Okun menyatakan bahwa adanya hubungan negatif linier antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi: kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen akan menurunkan pengangguran sebesar 1 persen. Artinya semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi tersebut lebih berorientasi pada padat karya sehingga memberikan peluang kerja baru ataupun kesempatan kerja, yang berarti proses produksi lebih menggunakan tenaga kerja manusia daripada tenaga mesin atau teknologi canggih.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Ketika ekonomi tumbuh, maka terdapat pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ketika hal ini terjadi maka kebutuhan akan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa pun akan ikut tumbuh sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.



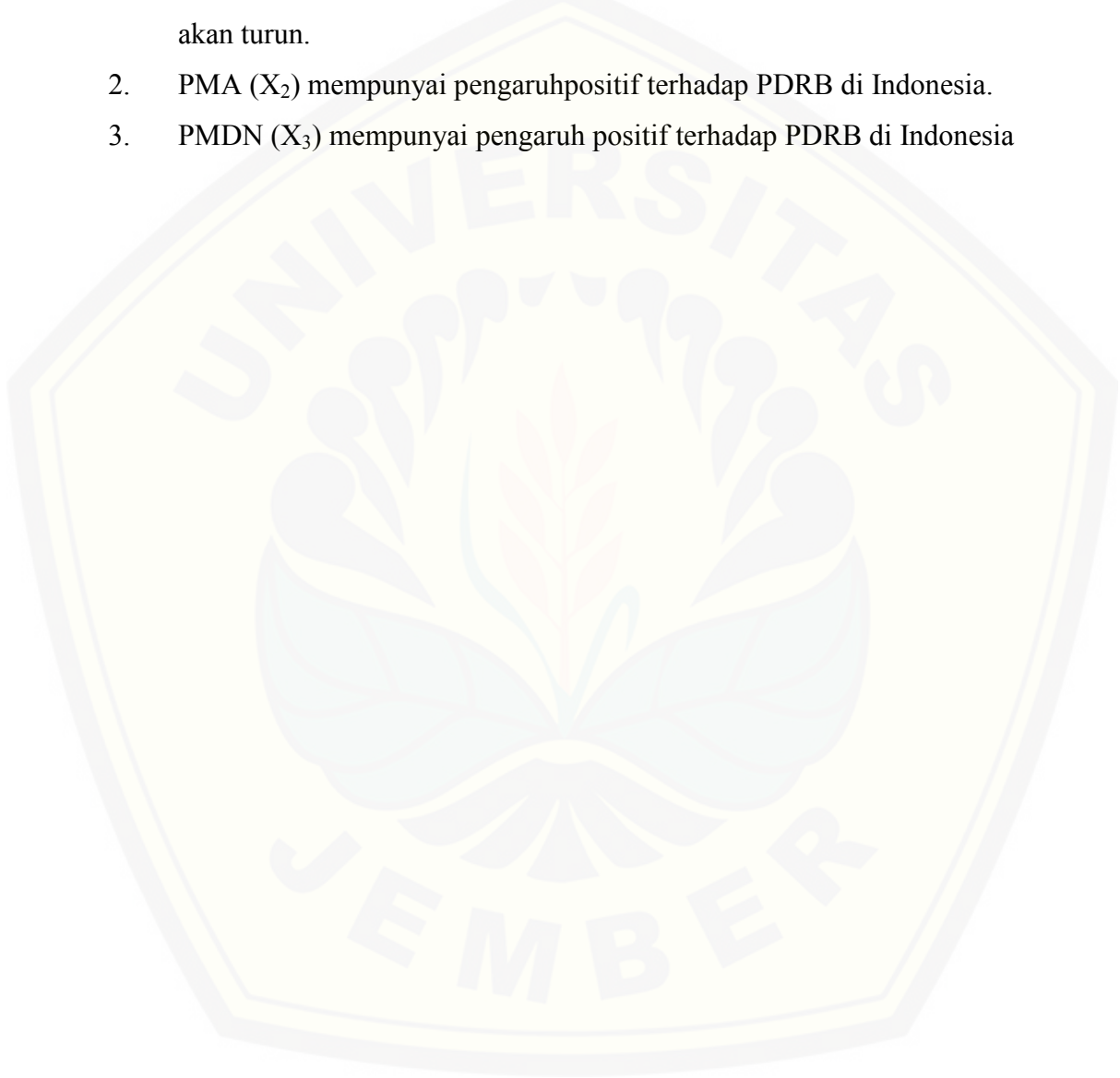


(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian)

### 2.11 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini berdasarkan landasan teori adalah sebagai berikut :

1. Pengangguran ( $X_1$ ) mempunyai pengaruh negatif terhadap PDRB di Indonesia, artinya bahwa semakin meningkat pengangguran maka PDRB akan turun.
2. PMA ( $X_2$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB di Indonesia.
3. PMDN ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap PDRB di Indonesia



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode *explanatory*, yaitu jenis penelitian yang mencari pola hubungan atau pengaruh antara pengangguran, PMA dan PMDN terhadap PDRB Indonesia.

Penelitian *explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel X dan Y. Menurut (sani & vivin, 2013 :180) penelitian explanatory adalah untuk menguji hipotesis antar variabel yang dihipotesiskan. Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu menggambarkan hubungan antara dua variabel, untuk mengetahui apakah variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya menurut Faisal dalam (Sani dan vivin, 2013 :181).

### 3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu penelitian 2012-2016. Provinsi – provinsi tersebut yaitu : Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Baten, Bali, Nusatenggara Barat, Nusatenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua Timur.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

PDRB Indonesia dipengaruhi oleh Tingkat Pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS).Data yang digunakan merupakan data sekunder yang digunakan adalah menggabungkan dari deret berkala (*time series*) dari tahun 2012–2016 dan deret lintang (*cross section*) sebanyak 33 data mewakili provinsi di Indonesia. Data sekunder yaitu data yang mengumpulkannya tidak diusahakan sendiri oleh

peneliti, misalnya diambil dari Badan Pusat Statistik. Dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005: 209). Periode data yang digunakan adalah data tahun 2012–2016 untuk masing–masing provinsi di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji tentang pengangguran, PMA serta PMDN dalam beberapa waktu. Dalam penelitian ini juga mengkaji tentang perkembangan pembangunan yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi secara umum tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

### 3.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2009: 248). Menurut Zulganef (2008: 41) unit analisis adalah sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah 33 Provinsi yang ada di Indonesia periode 2012-2016.

### 3.5 Spesifikasi Model

Untuk dapat mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas (*independent variabel*) terhadap variabel terkait (*dependent variabel*) maka penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Panel Least Square (PLS)*. Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu data panel merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* yang mampu menyediakan data lebih besar (Gujarati, 2009 :23-25). Digunakan metode ini agar dapat mengestimasi pengaruh Pengangguran ( $X_1$ ), PMA ( $X_2$ ) dan PMDN ( $X_3$ ) terhadap PDRB ( $Y$ ).

Dapat dinotasikan secara fungsi sebagai berikut:

$$PDRB = f(X_1, X_2, X_3).$$

Dari model diatas kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika, persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots$$

Keterangan :

Y = Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan

$X_1$  = Tingkat Pengangguran

- $X_2$  = Penanaman Modal Asing  
 $X_3$  = Penanaman Modal Dalam Negeri  
 $\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien  
 $\varepsilon$  = Kesalahan pengangguran (*error term*)

### 3.6 Metode Penelitian

#### 3.6.1 Metode Panel Least Square (PLS)

Data panel merupakan kombinasi observasi antara data *time series* dengan data *cross-section*. Terdapat dua jenis data panel dalam analisis ekonometri yaitu *balanced panel* dan *unbalanced panel*. Jika sebuah subjek memiliki waktu yang sama dalam observasi disebut *balanced panel* dan jika waktu observasi tidak sama dalam subjek maka disebut dengan *unbalanced panel* (Gujarati, 2009: 23-25).

Menurut Baltagi Dalam Gujarati (2009: 12) terdapat beberapa keuntungan menggunakan data panel, yaitu:

1. Data panel merupakan kombinasi antara data *time-series* dan data *cross-section* maka data panel akan memberikan data yang informatif, lebih variatif, mengurangi korelasi antar variabel, derajat kebebasan lebih banyak dan lebih efisien.
2. Dengan mempelajari bentuk *cross-section* berulang-ulang dari observasi, data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan.
3. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dalam mengukur efek-efek yang tidak dapat diobservasi dalam *cross-sectional* maupun data *time-series* murni.
4. Data panel memungkinkan untuk dipelajarinya model perilaku yang lebih rumit.

Dalam data model panel data, persamaan model dengan menggunakan data *cross-section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross-section*

Sedangkan persamaan model dengan *time-series* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana T adalah banyaknya data *time-series*



Mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$
$$i = 1, 2, \dots, N ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana:

- $Y_{it}$  = variabel dependen di waktu  $t$  untuk unit *cross section*  $i$   
 $X_{it}$  = variabel independen di waktu  $t$  untuk unit *cross section*  $i$   
 $\beta$  = Koefisien  
 $N$  = Banyaknya observasi  
 $T$  = Banyaknya waktu  
 $N \times T$  = Banyaknya data panel

### 3.6.2 Permodelan Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, digunakan beberapa teknik yaitu: *Model Pooled Least Square* (PLS), *Model Fixed Effect* dan *Model Random Effect*.

#### 1. *Pooled Least Square* (PLS)

Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan menggunakan kuadran terkecil biasa yang ditetapkan dalam data berbentuk pool, sering disebut pula dengan *pooled Least Square*. Model ini mengansumsikan bahwa data gabungan yang ada menunjukkan kondisi sesungguhnya dimana nilai intercept dari masing-masing variabel adalah sama dan slope koefisien dari variabel-variabel yang digunakan adalah identik untuk semua unit *cross section*.

Kelemahan *Pooled Least Square* yaitu adanya ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Dimana kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan satu objek pada waktu yang lain (Winarno, 2007:9.14).

#### 2. *Model Fixed effect*(FEM)

*Fixed-Effect Model* atau metode efek tetap ini dapat menunjukkan perbedaan antara objek meskipun dengan koefisien regresi yang sama. Efek tetap ini dimaksudkan adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya

untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Keunggulan metode efek tetap ini adalah dapat membedakan efek waktu dan tidak perlu mengansumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas yang sulit dipenuhi. Kelemahan model efek tetap ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kondisi tiap objek saling berbeda, bahkan objek tersebut pada waktu yang lain.

### 3. Model *Random effect*

*Random Effect Model (REM)* digunakan untuk mengatasi kelemahan metode effect tetap yang menggunakan *dummy variable*, sehingga model mengalami ketidakpastian. Pengguna *dummy variable* akan mengurangi derajat bebas yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

Untuk pemilihan model panel data yang paling tepat, maka perlu dilakukan serangkaian pengujian secara ekonomika. Secara umum pengujian tersebut dilakukan pengujian *chow*, kemudian melakukan uji hausman.

#### 3.6.3 Pemilihan Model Data Panel

##### 1. *Chow test*

*Chow test* merupakan uji untuk memilih apakah pendekatan model yang digunakan *common effect* dan *fixed effect* yang digunakan untuk menguji stabilitas dari parameter. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H<sub>0</sub> : Model *Common Effect (restricted)*

H<sub>1</sub> : Model *Fixed Effect (unrestricted)*

*Chow Test* menggunakan distribusi F dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{N-1, NT-N-K} = \frac{\frac{RRSS-URSS}{(N-1)}}{URSS/(NT-N-K)}$$

Keterangan :

RRSS = *Restricted Residual Sume Square*

URSS = *Unrestricted Residual Sume Square*

N = Jumlah data *cross section*

T = Jumlah data *Time series*

K = Jumlah variabel penjelas

Statistik F menggunakan distribusi F dengan N-1 dan N-K derajat kebebasan. Jika F dengan N-1 dan N-K derajat kebebasan. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau F signifikan maka pendekatan yang dipakai adalah *unrestricted* atau pendekatan *fixed effect*.

## 2. Hausman test

Untuk memilih pendekatan mana yang sesuai model persamaan dan data antara *fixed effect* dan *Random effect* dapat digunakan spesifikasi hausman. *Hausman test* ini menggunakan nilai *chi square* sehingga keputusan pemilihan metode data panel ini dapat ditentukan secara statistik. Hipotesis dari uji hausman sebagai berikut:

H0 : *Random effect model*

H1 : *fixed effect model*

Statistik hausman menggunakan *chi square* statistik, jika hasil uji hausman menolak hipotesis nol yaitu ketika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect* sedangkan sebaliknya gagal menolak hipotesis yaitu ketika nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka nilai yang tepat adalah model *random effect*.

## 3.7 Uji Statistik

Uji ini digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan (berbeda nyata). Signifikan yang dimaksud adalah suatu nilai koefisien slope sama dengan nol. Jika koefisien slope sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

### 3.7.1 Uji F (Uji Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji koefisien regresi secara simultan atau bersama-sama dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus (Gujarati, 2003: 257):

$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2) / n - k}$$

Dimana:

$R^2$  : Koefisien determinasi majemuk

$k-1$  : Derajat bebas pembilang

$n-k$  : Derajat bebas penyebut

$k$  : Banyak parameter total yang diperlukan

$n$  : Jumlah sampel

Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima atau ada pengaruh signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Begitu pula sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Adapun cara lain yang dapat digunakan adalah setelah melakukan regresi kemudian akan diperoleh probabilitas F-statistik, yang selanjutnya nilai probabilitas F-hitung dibandingkan dengan  $\alpha = 0,05$ . Jika probabilitas F-statistik lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Begitu pula sebaliknya, jika probabilitas F-statistik lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

### 3.7.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan. Hipotesis yang digunakan :

1.  $H_0 : b_1 = 0$  ( $i = 1,2,3$ ) tidak ada pengaruh antara variabel tingkat pengangguran, PMA dan PMDN dengan PDRB.
2.  $H_1 : b_1 \neq 0$  ( $i = 1,2,3$ ) ada pengaruh positif antara variabel tingkat pengangguran, PMA dan PMDN dengan PDRB.

Nilai t hitung dapat dicari dengan rumus :

$$t = \frac{b_i - b_i^*}{SE(b_i)}$$

dimana :

$b_i$  = parameter yang diestimasi

$b_i^*$  = nilai hipotesis dari  $b_i$  ( $H_0 : b_i = b_i^*$ )

$SE(b_i)$  = simpangan baku  $b_i$

Pada tingkat signifikan 5% dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b. Jika  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.8 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2014) bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu modal dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai ( $R^2$ ) adalah antara 0 dan 1. Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

### 3.9 Uji Asumsi Klasik

Pelaksanaan penelitian dalam melakukan analisis terdapat beberapa masalah sehingga digunakan analisis untuk mengestimasi suatu model dengan berbagai jumlah data. Apabila terjadi penyimpangan maka perlu diuji asumsi klasik dimana dengan adanya penyimpangan tersebut analisis yang dilakukan menjadi tidak valid. Apabila ditinjau pada prinsip dasarnya bahwa PLS tidak boleh menyimpang dari asumsi *Best Linier Unbiased Estimator (BLUE)* dimana kondisi tersebut akan terjadi jika dipenuhi dengan beberapa pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk dapat menestimasi model dari tiap variabel baik dependent maupun independent, residul, varian dan lain sebagainya. (Triyono, 2008).

#### 3.9.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika antar variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak *orthogonal*. Cara mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi menurut Ghozali (2005: 178), adalah sebagai berikut :



1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisa metrik korelasi antar variabel-variabel bebas. Apabila antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
3. Gejala multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF > 0,10$ , maka hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas.

### 3.9.2 Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama (Gujarati, 2004: 438):

1. Melakukan regresi variabel terikat Y terhadap semua variabel penjelas  $X_i$  dan memperoleh nilai residual ( $e$ ).
2. Melakukan regresi dari nilai absolut residual ( $e$ ) terhadap  $X_i$  yang mempunyai hubungan erat dengan bentuk regresi sebagai berikut:

$$e = \beta_0 + \beta_1 X_i + \mu_i ;$$

3. Menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas dalam uji statistic untuk menguji hipotensi :

$$H_0 : \quad \epsilon_1 = 0 \text{ dan } H_1 : \quad \epsilon_1 \neq 0 ;$$

4. Kriteria pengambilan keputusan
  - a. Jika probabilitas  $t > \alpha$  maka dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas;
  - b. Jika probabilitas  $t \leq \alpha$  maka dalam model terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi antara variabel bebas terhadap variabel residual dinyatakan terhadap gejala heteroskedastisitas apabila variabel bebasnya memiliki hubungan yang sempurna terhadap variabel residual.

### 3.9.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hal tersebut seperti diketahui bahwa uji t dan uji f megasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Untuk dapat mendeteksi apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Gozali,2006:112).

Prosedur pengkajian statistik didasarkan pada asumsi bahwa faktor kesalahan  $\mu_i$  didistribusikan secara normal, karena kesalahan  $\mu_i$  yang sebenarnya tidak dapat diamati secara langsung, maka direkomendasikan untuk menggunakan residu  $e_i$  yang merupakan taksiran  $\mu_i$  untuk mengetahui normalitas dari  $\mu_i$ . Keadaan harus terlihat jelas dan dapat terpenuhi dalam hubungan dengan keapsahan yang dilakukan oleh uji t dan uji f.

Kriteria pengujian kenormalan adalah dengan menghitung nilai *Chi square* dengan keterangan dimana jika  $C_s$  hitung  $> C_s$  tabel, dikatakan bahwa residual dari model tidak normal dan sebaliknya dan dapat dilakukan dengan membandingkan dengan nilai *Jarque-Bera*(JB). Apabila  $JB > X^2$  tabel maka residualnya berdistribusi tidak normal dan sebaliknya, apabila  $JB \leq X^2$  tabel maka residualnya berdistribusi normal. Sehingga dapat dilakukan juga dengan menggunakan nilai probabilitas JB apabila signifikan 0,05 maka residual berdistribusi normal.

### 3.10 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Beberapa variabel operasional dalam penelitian ini untuk membatasi dan menerangkan variabel operasional yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. PDRB (Y)

PDRB adalah sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi disuatuwilayah. Data yang digunakan untuk melihat PDRB adalah PDRB harga konstan 2010 di Indonesia menurut Provinsi pada tahun 2012–2016 (dalam satuan miliar rupiah).

2. Pengangguran

Pengangguran dapat diartikan sebagai seseorang yang sudah masuk dalam kategori angkatan kerja namun belum mendapatkan kerja atau masih

mencari kerja. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) adalah meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha kerja, penduduk yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Data yang digunakan untuk melihat pengangguran adalah pengangguran terbuka di Indonesia Provinsi tahun 2012–2016 dalam satuan persen.

3. PMA (Penanaman Modal Asing)

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (pasal 1 UU no.25 tahun 2017 tentang penanaman modal). PMA lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Data PMA yang di gunakan adalah data PMA pada tahun 2012-2016 (Juta US\$).

4. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)

PMDN adalah aliran dana dari pemerintah daerah atau pusat yang di wujudkan dengan pengadaan barang publik, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan infrastruktur. Data PMDN yang digunakan adalah data PMDN pada tahun 2012-2016 (Juta US\$).

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Indonesia tahun 2012-2016. Berpengaruh negatif artinya semakin meningkatnya pengangguran maka PDRB akan menurun, dan apabila pengangguran turun maka PDRB akan meningkat. Hal tersebut dikarenakan tingginya tingkat investasi sehingga pengangguran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB di Indonesia.
2. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah investasi maka pertumbuhan PDRB di Indonesia akan meningkat.
3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah investasi maka pertumbuhan PDRB di Indonesia akan meningkat.

### 5.2 Saran

Dari kesimpulan terdapat beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh yang tidak signifikan antara tingkat pengangguran dengan PDRB di Indonesia, diharapkan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap SDM.
2. Pemerintah diharapkan dapat menarik minat investor asing dengan cara menciptakan iklim yang kondusif, penyerderhanaan proses perjanjian dan memperbaiki sarana maupun prasarana infrastruktur sehingga diharapkan nilai investasi asing (PMA) dapat meningkatkan PDRB.
3. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan minat investor dalam negeri dengan cara menciptakan iklim yang kondusif, memperbaiki sarana dan prasarana.

4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas baru lainya yang dapat mempengaruhi PDRB dengan periode waktu yang lebih panjang sehingga hasil penelitiannya menjadi lebih baik.





**DAFTAR PUSATAKA**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Astuti, Wurdianti Yuli. 2014. Pengangguran Terdidik di Perkotaan. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi UNY.
- Bachrawi, Sanusi. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta; Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Memahami Data Strategi yang Dihasilkan BPS*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Realisasi Penanaman Modal Asing*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Tingkat Pengangguran*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- David, Ricardo. 2008. *Teori Pertumbuhan Klasik*. PT. Raja grafindo pustaka. Jakarta.
- Dumairy, 2004. *Perekonomian Indonesia*, Cetak Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Eni Setyowati dan Siti Fatimah. 2007. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Dalam Negeri di Jawa Tengah 1980-2002*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso. 2002. *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, Damodar. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

- Glasson, J. 1997. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Irawan dan Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan. Edisi 6*. Jakarta: BPFE UGM.
- Jhingan, dalam Sinardhin Thahir, 2002. *Definisi Dari Penanaman Modal Asing*. Jurnal Makro Ekonomi. Jakarta.
- Jhingan, M.I. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Terjemahan Guritno Rajawali.
- Kamaludin, Rustian. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia..
- Lipsey, Richard G, dkk. 1991. *Pengantar Makroekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Latumaerissa, Julius R. 2015. *Perekonomian Indonsia dan Dinamika Ekonomi Global*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2006. *Teori Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Marzuki. 2005. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta. Ekonisia.
- M.P. Todaro. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, Edisi 4. Penerbit Erlangga, Jakarta).
- Poernomosidi Hadjisaroso. 2001. Naskah 1: *Butir-butir untuk Memahami Pengertian Mengenali Hal Secara Utuh dan Benar (Bahan Kuliah STIE Mitra Indonesia)*.
- Pindyck, Robert S dan Rubinfeld, Daniel L. 1998. *Econometric Models and Economic Forecasts 4th edition*. Boston: McGraw-Hil.
- Richardson, Harry W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Regional (terjemahan paul Sitohang)*. Jakarta: FE UI.
- Rahardja, Pratama. 2008. *Teori Ekonomi Makro*. Edisi Keempat: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rum, Alim Moch. 2007. *Analisis Faktor Penentu Pengangguran Terbuka di Indonesia Periode 1980-2007*.
- Samuelson, Paul A. 2008. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Samuelson, Paul A dan William D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Media Edukasi.
- Schumpeter, Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan*, Jakarta: Salemba Empat.

- Sunariyah, 2003. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Syah, Thomamas Budiman. 2005. *Analisis Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun 1983-2003*.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduouse Media.
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 1993. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jilid Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970, tentang Penanaman Modal Asing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
- Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Widjaya, Rai. 2000. *Merancang Suatu Kontrak. Edisi Revisi*. Jakarta : Kesaint Blanc.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.

Wing, Wahyu Winarno. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Unit Penerbit dan Percetakan Yogyakarta.

Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.



## Lampiran A

Data PDRB di Indonesia Tahun 2012-2016 (Miliar Rupiah)

No	Provinsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	108914,9	111755,83	113490,36	112661,04	116386,73
2	Sumatera Utara	375924,14	398727,14	419573,31	440955,85	463775,46
3	Sumatera Barat	118724,42	125940,63	133340,84	140704,88	148110,75
4	Riau	425626	436187,51	447986,78	448991,96	458998,09
5	Jambi	104615,08	111766,13	119991,44	125036,4	130499,63
6	Sumatera Selatan	220459,2	232175,05	243297,77	254044,88	266815,41
7	Bengkulu	32363,04	34326,37	36207,15	38066,01	40082,87
8	Lampung	170769,21	180620,01	189797,49	199536,1	209807,19
9	Kep. Bangka Belitung	40104,91	42190,86	44159,44	45961,46	47852,69
10	Kep. Riau	128034,97	137263,85	146325,23	155112,88	162922,5
11	Dki Jakarta	1222527,92	1296694,57	1373389,13	1454345,82	1539376,6
12	Jawa Barat	1028409,74	1093543,55	1149216,06	1207083,41	1275546,4
13	Jawa Tengah	691343,12	726655,12	764959,15	806775,36	849383,56
14	Di Yogyakarta	71702,45	75627,45	79536,08	83474,44	87687,93
15	Jawa Timur	1124464,64	1192789,8	1262684,5	1331394,99	1405236,1
16	Banten	310385,59	331099,11	349351,23	368216,55	387595,37
17	Bali	106951,46	114103,58	121787,57	129130,59	137192,52
18	Nusa Tenggara Barat	66340,81	69766,71	73372,96	89344,58	94548,21
19	Nusa Tenggara Timur	48863,19	51505,19	54107,97	56831,92	59775,7
20	Kalimantan Barat	96161,93	101980,34	107114,96	112324,86	118184,63
21	Kalimantan Tengah	64649,17	69410,99	73724,52	78890,97	83909,49
22	Kalimantan Selatan	96697,84	101850,54	106779,4	110867,88	115727,55
23	Kalimantan Timur	469646,25	438532,91	446029,05	440647,7	438977,04
24	Sulawesi Utara	58677,59	62422,5	66360,76	70425,14	74771,07
25	Sulawesi Tengah	62249,53	68219,32	71677,53	82803,2	91070,55
26	Sulawesi Selatan	202184,59	217589,13	233988,05	250758,28	269338,55
27	Sulawesi Tenggara	59785,4	64268,71	68291,78	72991,33	77739,55
28	Gorontalo	17987,07	19367,57	20775,8	22068,59	23507,15
29	Sulawesi Barat	20786,89	22227,39	24195,65	25983,65	27550,26
30	Maluku	21000,08	22100,94	23567,73	24859,06	26291,19
31	Maluku Utara	17120,07	18208,74	19208,76	20381,03	21556,32
32	Papua Barat	44423,34	47694,23	50259,91	52346,49	54711,28
33	Papua	107890,94	117118,82	121391,23	130459,91	142476,35

Sumber: BPS Indonesia, 2017



## Lampiran B

Data Realisasi PMA Tahun 2012-2016 di Indonesia (Juta US\$)

No	Provinsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	172,3	94,2	31,1	21,2	134,5
2	Sumatera Utara	645,3	887,5	550,8	1246,1	1014,7
3	Sumatera Barat	75	91,4	112,1	57,1	79,3
4	Riau	1152,9	1304,9	1369,5	653,4	869,1
5	Jambi	156,3	34,3	51,4	107,7	61
6	Sumatera Selatan	786,4	485,9	1056,5	645,8	2793,5
7	Bengkulu	30,4	22,3	19,3	20,6	55,7
8	Lampung	114,3	46,8	156,5	257,7	85,7
9	Kep. Bangka Belitung	59,2	112,4	105	82,7	52,7
10	Kep. Riau	537,1	315,7	392,1	640,4	519,1
11	Dki Jakarta	4107,7	2591,1	4509,4	3619,4	3398,2
12	Jawa Barat	4210,7	7124,9	6562	5738,7	5470,9
13	Jawa Tengah	241,5	464	463,3	850,4	1030,8
14	Di Yogyakarta	84,9	29,6	64,9	89,1	19,6
15	Jawa Timur	2298,8	3396,3	1802,5	2593,4	1941
16	Banten	2716,3	3720,2	2034,6	2542	2912,1
17	Bali	482	390,9	427,1	495,8	450,6
18	Nusa Tenggara Barat	635,8	488,2	551,1	699,4	439
19	Nusa Tenggara Timur	8,7	9,9	15,1	69,9	58,2
20	Kalimantan Barat	397,5	650	966,1	1335,7	630,7
21	Kalimantan Tengah	524,7	481,6	951	933,6	408,2
22	Kalimantan Selatan	272,3	260,6	502,5	961,2	249,4
23	Kalimantan Timur	2014,1	1335,4	2145,7	2381,4	1139,6
24	Sulawesi Utara	46,7	65,7	98,4	88	382,8
25	Sulawesi Tengah	806,5	855	1494,2	1085,2	1600,3
26	Sulawesi Selatan	582,6	462,8	280,9	233,3	372,5
27	Sulawesi Tenggara	35,7	86,4	161,8	145	376,1
28	Gorontalo	35,3	25,7	4,1	6,9	12,7
29	Sulawesi Barat	0,2	2,5	16,3	2	20,6
30	Maluku	8,5	53,8	13,1	82,4	102,6
31	Maluku Utara	90,3	268,5	98,7	203,8	438,9
32	Papua Barat	32	54,2	153,4	258,6	514,5
33	Papua	1202,4	2360	1260,6	897	1168,4
Indonesia		24564,7	28617,5	28529,7	29275,9	28964,1

Sumber: BPS Indonesia, 2017

## Lampiran C

Data PMDN Tahun 2012-2016 di Indonesia (US\$ Juta)

No	Provinsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	60.2	3636.4	5110.3	4192.4	2456.1
2	Sumatera Utara	2550.3	5068.9	4223.9	4287.4	4864.2
3	Sumatera Barat	885.3	677.8	421.1	1552.5	3795.6
4	Riau	5450.4	4874.3	7707.6	9943.0	6613.7
5	Jambi	1445.7	2799.6	908.0	3540.2	3884.4
6	Sumatera Selatan	2930.6	3396.0	7042.8	10944.1	8534.1
7	Bengkulu	52.6	109.6	7.8	553.9	949.1
8	Lampung	304.2	1325.3	3495.7	1102.3	6031.8
9	Kep. Bangka Belitung	533.5	608.2	615.5	1023.7	2202.0
10	Kep. Riau	43.5	417.7	28.5	612.1	492.5
11	DKI Jakarta	8540.1	5754.5	17811.5	15512.7	12216.9
12	Jawa Barat	11384.1	9006.1	18726.9	26272.9	30360.2
13	Jawa Tengah	5797.1	12593.6	33601.6	15410.7	24070.4
14	DI Yogyakarta	334.0	283.8	703.9	362.4	948.6
15	Jawa Timur	21520.3	34848.9	38132.0	35489.8	46331.6
16	Banten	5117.5	4008.7	8081.3	10709.9	12426.3
17	Bali	3108.0	2984.7	252.8	1250.4	482.3
18	Nusa Tenggara Barat	45.4	1398.0	212.5	347.8	1342.8
19	Nusa Tenggara Timur	14.4	17.6	3.6	1295.7	822.2
20	Kalimantan Barat	2811.0	2522.1	4320.8	6143.5	9015.5
21	Kalimantan Tengah	4529.6	1835.3	980.4	1270.1	8179.1
22	Kalimantan Selatan	3509.8	8299.2	2616.5	2060.4	6163.0
23	Kalimantan Timur	5889.3	16034.6	12859.0	9611.3	6885.1
24	Sulawesi Utara	678.5	66.8	83.0	270.6	5069.6
25	Sulawesi Tengah	602.8	605.3	95.8	968.4	1081.2
26	Sulawesi Selatan	2318.9	921.0	4949.6	9215.3	3334.6
27	Sulawesi Tenggara	907.3	1261.6	1249.9	2015.4	1794.2
28	Gorontalo	164.9	84.4	45.1	94.3	2202.5
29	Sulawesi Barat	228.6	685.1	690.1	1103.8	84.1
30	Maluku	3.4	5.4	4.8	6.7	11.4
31	Maluku Utara	320.5	1114.9	156.3	48.2	8.8
32	Papua Barat	45.8	304.0	100.0	63.4	10.6
33	Papua	54.7	584.3	249.9	1275.2	220.5
	Indonesia	92182.0	128150.6	156126.3	179465.9	216230.8

Sumber: BPS Indonesia, 2017

**Lampiran D**

Data Pengangguran di Indonesia Tahun 2012-2016 (dalam persen)

No	Provinsi	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Aceh	8,5	9,23	7,885	8,83	7,85
2	Sumatera Utara	6,355	6,27	6,09	6,55	6,165
3	Sumatera Barat	6,57	6,705	6,41	6,44	5,45
4	Riau	4,83	4,835	5,775	7,275	6,685
5	Jambi	3,445	3,825	3,79	3,535	4,33
6	Sumatera Selatan	5,63	5,125	4,4	5,55	4,125
7	Bengkulu	2,9	3,355	2,545	4,06	3,57
8	Lampung	5,205	5,38	4,935	4,29	4,58
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,125	3,435	3,905	4,82	4,385
10	Kepulauan Riau	5,395	5,84	5,975	7,625	8,36
11	DKI Jakarta	10,135	9,135	9,155	7,795	5,945
12	Jawa Barat	9,46	9,02	8,555	8,56	8,73
13	Jawa Tengah	5,755	5,77	5,565	5,15	4,415
14	DI Yogyakarta	3,94	3,495	2,745	4,07	2,765
15	Jawa Timur	4,135	4,135	4,105	4,39	4,175
16	Banten	10,31	9,655	9,47	9,065	8,435
17	Bali	2,165	1,88	1,635	1,68	2,005
18	Nusa Tenggara Barat	5,23	5,29	5,525	5,335	3,8
19	Nusa Tenggara Timur	2,785	2,685	2,615	3,475	3,42
20	Kalimantan Barat	3,48	3,56	3,285	4,965	4,405
21	Kalimantan Tengah	2,935	2,405	2,975	3,84	4,245
22	Kalimantan Selatan	4,765	3,77	3,915	4,875	4,54
23	Kalimantan Timur	9,25	8,445	8,135	7,335	8,405
24	Sulawesi Utara	8,265	7,145	7,405	8,86	7
25	Sulawesi Tengah	3,85	3,43	3,3	3,545	3,375
26	Sulawesi Selatan	6,285	5,49	5,435	5,88	4,955
27	Sulawesi Tenggara	3,67	3,905	3,28	4,585	3,25
28	Gorontalo	4,695	4,33	3,31	3,855	3,32
29	Sulawesi Barat	2,13	2,185	1,84	2,58	3,025
30	Maluku	7,65	8,44	8,55	8,325	7,015
31	Maluku Utara	5,16	4,65	5,47	5,805	3,72
32	Papua Barat	5,995	4,38	4,36	6,345	6,595
33	Papua	3,37	3,03	3,46	3,855	3,16
Indonesia		6,25	6,025	5,82	5,995	5,555

Sumber: BPS Indonesia, 2017

**Lampiran E**

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	251.433137	(32,129)	0.0000
Cross-section Chi-square	684.586075	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/28/18 Time: 19:14

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.702956	0.216017	35.65910	0.0000
X1	0.498032	0.119376	4.171966	0.0000
X2	0.255276	0.031997	7.978214	0.0000
X3	0.263775	0.025855	10.20213	0.0000
R-squared	0.746643	Mean dependent var		11.75590
Adjusted R-squared	0.741922	S.D. dependent var		1.164905
S.E. of regression	0.591787	Akaike info criterion		1.812604
Sum squared resid	56.38413	Schwarz criterion		1.887900
Log likelihood	-145.5398	Hannan-Quinn criter.		1.843169
F-statistic	158.1560	Durbin-Watson stat		0.494470
Prob(F-statistic)	0.000000			

**Lampiran F**

Hasil Uji Hausman  
 Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	106.965791	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.048899	0.002366	0.000134	0.0000
X2	0.042333	0.060614	0.000005	0.0000
X3	0.025954	0.033300	0.000001	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/28/18 Time: 19:15

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.41526	0.105871	107.8220	0.0000
X1	-0.048899	0.052610	-0.929474	0.3544
X2	0.042333	0.010879	3.891196	0.0002
X3	0.025954	0.006551	3.961628	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996002	Mean dependent var	11.75590
Adjusted R-squared	0.994917	S.D. dependent var	1.164905
S.E. of regression	0.083050	Akaike info criterion	-1.948524
Sum squared resid	0.889746	Schwarz criterion	-1.270863
Log likelihood	196.7532	Hannan-Quinn criter.	-1.673438
F-statistic	918.2062	Durbin-Watson stat	0.788891
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 9

## Lampiran G

Hasil Regresi Fixed Effect Model



Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 06/28/18 Time: 19:15  
 Sample: 2012 2016  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 33  
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.41526	0.105871	107.8220	0.0000
X1	-0.048899	0.052610	-0.929474	0.3544
X2	0.042333	0.010879	3.891196	0.0002
X3	0.025954	0.006551	3.961628	0.0001

#### Effects Specification

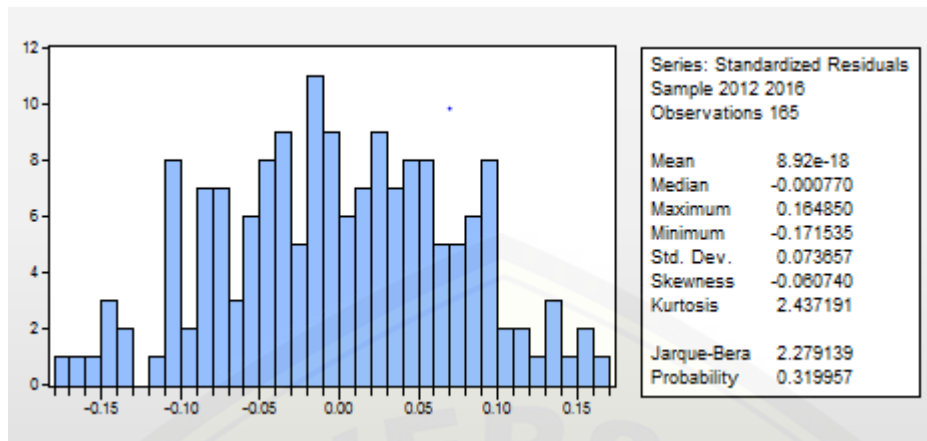
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996002	Mean dependent var	11.75590
Adjusted R-squared	0.994917	S.D. dependent var	1.164905
S.E. of regression	0.083050	Akaike info criterion	-1.948524
Sum squared resid	0.889746	Schwarz criterion	-1.270863
Log likelihood	196.7532	Hannan-Quinn criter.	-1.673438
F-statistic	918.2062	Durbin-Watson stat	0.788891
Prob(F-statistic)	0.000000		

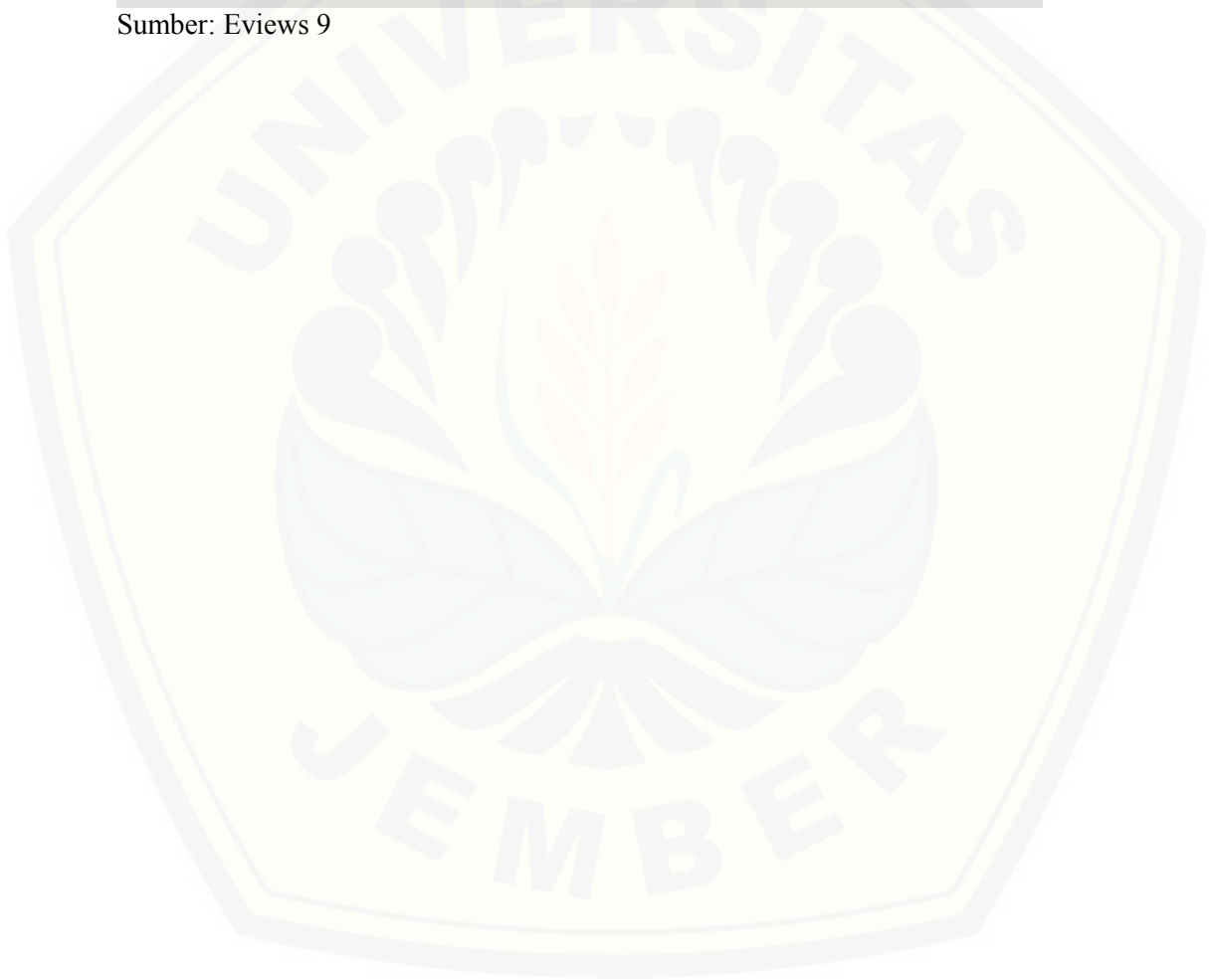
Sumber: Eviews 9

## Lampiran H

Uji Normalitas



Sumber: Eviews 9

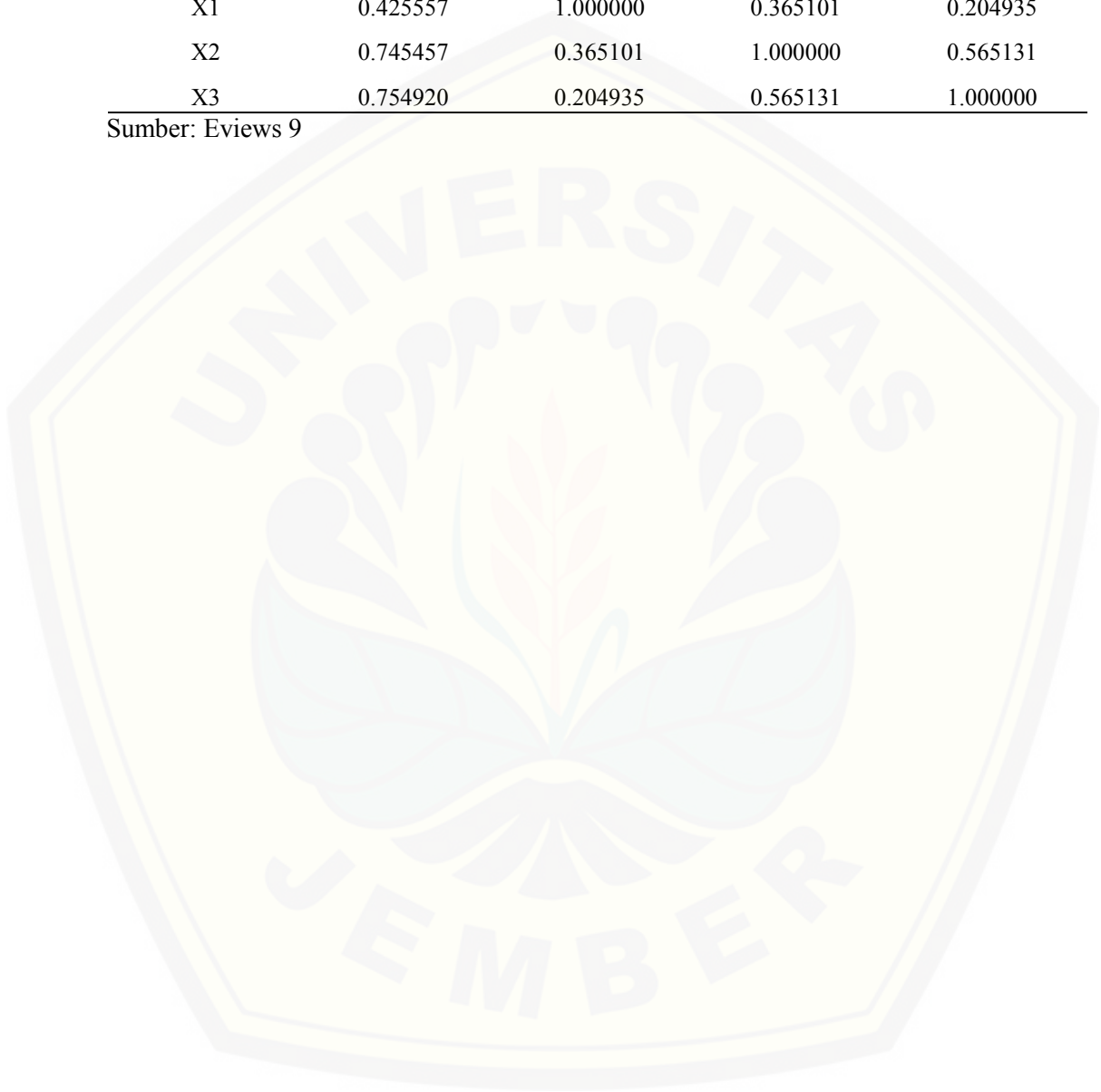


**Lampiran I**

## Uji Multikolinearitas

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000000	0.425557	0.745457	0.754920
X1	0.425557	1.000000	0.365101	0.204935
X2	0.745457	0.365101	1.000000	0.565131
X3	0.754920	0.204935	0.565131	1.000000

Sumber: Eviews 9



**Lampiran J**

## Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 06/28/18 Time: 19:17

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.007095	0.050243	0.141222	0.8879
X1	0.015997	0.024967	0.640727	0.5228
X2	0.004035	0.005163	0.781563	0.4359
X3	0.000820	0.003109	0.263731	0.7924

## Effects Specification

## Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.303102	Mean dependent var	0.060414
Adjusted R-squared	0.114021	S.D. dependent var	0.041872
S.E. of regression	0.039412	Akaike info criterion	-3.439247
Sum squared resid	0.200380	Schwarz criterion	-2.761586
Log likelihood	319.7379	Hannan-Quinn criter.	-3.164161
F-statistic	1.603025	Durbin-Watson stat	2.084477
Prob(F-statistic)	0.030620		

Sumber: Eviews 9